BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

MILIK PERPUS
UNIMED

5.1 Kesimpulan Faktual

Penelitian ini menemukan bahwa:

1. Persaingan terjadi di lembaga-lembaga politik yaitu DPRD II dan Pemko Medan, ciri keetnikan dan keagamaan dapat membangun kebersamaan untuk memperoleh dan mempertahankan jabatan.
2. Team sukses di pemko dapat digunakan sebagai saluran untuk memperoleh jabatan dengan tidak melupakan balas budi dengan penentu jabatan.
3. Komposisi etnis sesuai data sensus BPS Tahun 2000, terabaikan tidak menjadi pertimbangan bagi caleg dan jabatan-jabatan di Pemerintahan Kota Medan.
4. Pemilihan langsung di DPRD II, diprediksi akan menggeser calon urut jadi yang ditetapkan oleh partai politik.

5.2. Kesimpulan Konseptual

1. Memenangkan persaingan untuk memperoleh jabatan didominasi oleh faktor kedekatan etnik dan agama dengan patron
2. Kekerabatan, kesamaan ideologi, agama dan kepatuhan kepada patron akan dapat menumbuhkan kepercayaan kepada klien sebagai penerima jabatan.

5.3. Implikasi

Tidak tersalurnya sejumlah pegawai yang memiliki golongan III dan IV di Pemko Medan sebesar 3.048 orang akan menjadi embrio dari sebuah manajemen

yang menyebabkan terjadi pemubaziran (*inefisien*) penggunaan anggaran negara di lembaga birokrasi negara.

Bahwa pegawai negeri yang tidak punya jabatan di Pemko Medan hanya hadir dan datang untuk menandatangani absen, membaca surat kabar, bercerita sesama mereka untuk menghabiskan waktu setiap hari.

Budaya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk memperoleh sejumlah uang dari orang-orang yang dilayani akan tetap subur dan hal inilah sebuah pembudayaan nilai yang mengagumkan di Pemko Medan. Kurang konsistennya pada peraturan tentang penseleksian pejabat akan berakibat hilangnya semangat percaya diri dan berprestasi bagi para pegawai.

5.4. Saran

Sebaiknya walikota dan DPRD II Medan mendiskusikan pemberdayaan pegawai yang tidak kebagian jabatan, direkruit untuk membuat lapangan pekerjaan baru yang bisa mendatangkan hasil dan pendapatan bagi mereka serta pemasukan kepada Pemko Medan. Dan bagi mereka yang tidak bisa produktif lagi sebaiknya di pensiunkan.

Bagi jabatan-jabatan penting di Pemko harus memberi pelayanan kepada rakyat tanpa membebankan biaya diluar peraturan.

Kalangan DPRD II Medan perlu keterbukaan dalam merumuskan anggaran APBD dengan mendahulukan prioritas terpenting bagi kehidupan rakyat banyak.

DPRD II harus melibatkan publik, masyarakat pengguna, LSM dan kampus agar transparansi dan akuntabilitas berkembang secara demokratis di Pemko Medan.

Pemanfaatan etnis dan agama harus mengacu pada azas kemampuan kompetensi, kejujuran dan terbuka bagi seluruh pegawai yang dipromosikan menduduki jabatan. Penilaian sebaiknya melibatkan masyarakat yang dilayani dan para bawahan sebagai sumber informasi biodata dan kepimpinan bagi pejabat yang akan dipromosikan.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY